

Dewan Bentuk Panitia Kerja

Telaah Opini Tidak Wajar di APBD

SUNGAI RAYA—Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kubu Raya membentuk panitia kerja (panja) terkait Opini Tidak Wajar yang diraih Pemkab berdasarkan hasil audit dan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. "Pembentukan panja ini untuk menindaklanjuti hasil temuan BPK supaya dikoreksi terutama beberapa rekomendasi hasil audit tersebut. Ini juga sebagai upaya perbaikan supaya di tahun berikutnya, Pemkab Kubu Raya meraih opini lebih baik," kata Sujiwo SE, Ketua DPRD Kubu Raya kepada sejumlah wartawan, Kamis (14/7).

Dia mengatakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2010, DPRD akan menindaklanjuti hasil audit yang telah diserahkan ke DPRD. Apalagi, kalau dinilai BPK-RI persoalan keuangannya tidak wajar.

DPRD Kubu Raya menawarkan pada tahun 2012 mendatang supaya Pemkab Kubu Raya dapat meraih opini terbaik secara bertahap seperti Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Makanya pembentukan panja ini hanyalah

sebagai alternatif solusi dalam upaya perbaikan pengelolaan keuangan daerah. "Sebagai upaya pencapaian terbaik dalam pemeriksaan administrasi keuangan daerah oleh BPK," ungkap politikus PDI Perjuangan bersuara vokal ini.

Ketua Panja, Suprpto menerangkan beberapa temuan yang terjadi di Kubu Raya antara lain persoalan aset daerah adalah masih banyaknya bangunan sekolah tidak memiliki sertifikat. "Ini memang bukan kesalahan fatal. Akan tetapi harus menjadi perhatian khusus Pemkab. Oleh karena itu, kita akan mengkaji kesalahan yang terjadi dan kemudian hasilnya kita rekomendasikan ke Pemkab Kubu Raya," ujarnya.

Lebih jauh politikus Golkar Kubu Raya ini menerangkan penilaian tidak wajar ini bukan berarti setiap SKPD tidak mampu menjalankan kinerjanya. Aka tetapi masih barunya Kubu Raya sebagai kabupaten baru dan membutuhkan banyak pelajaran. "Anggap saja, temuan BPK RI sebagai pembelajaran Pemkab untuk memperbaikinya," terang dia.

Pihak DPRD Kubu Raya juga mengusulkan kepada Bupati Kubu Raya agar bisa memberikan teguran, saran atau evaluasi kepada setiap kepala SKPD. Ini juga untuk memotivasi menindaklanjuti temuan BPK RI. (*den*)